

EDITORIAL

Jurnal TINGKAP Volume XI, No. 2 bulan Oktober 2015 ini menyajikan 6 artikel, yaitu 3 artikel hasil penelitian, 3 artikel teoretik (konseptual), dan 1 Resensi buku. Tulisan-tulisan tersebut terangkum dalam satu tema: *Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan* dan meliputi berbagai topik, yaitu: *Estimasi Fungsi Konsumsi Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi* (Adi Bhakti); *Bentuk dan Pola Kemitraan pada Masyarakat Nelayan Cilacap* (Dewi Harfina S. dan Eniarti B. Djohan); *Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam* (Indah Muliati); *Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara* (Mestika Zed); *Evaluating The PRRI Rebellion As A West Sumatran Peasant Movement* (Kevin W. Fogg); dan *Pemahaman dan Pembentukan Karakter Masyarakat: Realitas dan Pandangan Antropologi* (Nursyirwan Effendi). Selain itu Jurnal edisi ini juga dilengkapi dengan satu resensi buku yang ditulis oleh Depitriaadi: *Hukum Yang Tak Berkeadilan*.

Pada tulisan pertama dalam edisi ini **Adi Bhakti** mengemukakan hasil penelitiannya tentang Estimasi Fungsi Konsumsi Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi. Menurut Adi Bhakti, proses pembangunan ekonomi provinsi Jambi yang berlangsung secara berkesinambungan akhir-akhir ini telah diikuti oleh peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan kesejahteraan penduduk propinsi Jambi melalui peningkatan pendapatan perkapita ini juga telah diikuti oleh peningkatan pengeluaran konsumsi. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk propinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Setiap orang atau rumah tangga selalu melakukan kegiatan konsumsi guna memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidupnya. Namun pada tahap awal kegiatan pembangunan biasanya seseorang atau rumah tangga akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer terutama kebutuhan akan pangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang utama bagi seseorang untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Disamping itu juga karena masih rendahnya pendapatan yang mereka terima. Dalam kaitan inilah menurut Adi Bhakti perlu dilakukan kajian dan analisis yang lebih mendalam terhadap perubahan pola pengeluaran konsumsi dan perubahan fungsi konsumsi baik pangan maupun non pangan dari penduduk propinsi Jambi. Melalui penelitian ini Adi Bhakti ingin mendapatkan jawaban tentang: 1) Bagaimana perkembangan pengeluaran konsumsi perkapita pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?; 2) Bagaimana pola pengeluaran konsumsi perkapita pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?; 3) Berapa besar *Marginal Propensity to Consume* (MPC) pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?; dan 4) Bagaimana fungsi konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi? Berdasarkan hasil penelitiannya ini Adi Bhakti berkesimpulan bahwa selama periode waktu 1993-2011 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selalu meningkat dengan

peningkatan rata-rata sebesar 52,11 persen pertiga tahun atau sebesar 17,37 persen pertahun. Peningkatan pengeluaran perkapita untuk konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 juga selalu meningkat, namun peningkatan pengeluaran untuk konsumsi non pangan lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 56,10 persen pertiga tahun. Pola pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan provinsi Jambi masih didominasi untuk konsumsi pangan dengan proporsi rata-rata sebesar 55,99 persen, sedangkan proporsi pengeluaran non pangan rata-rata sebesar 44,01 persen. Disamping itu *Marginal propensity to consume* (MPC) pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 cenderung menurun. Namun MPC untuk pangan masih lebih besar dari MPC non pangan. Selanjutnya, konsumsi otonom (Co) untuk pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 yaitu sebesar 408.795 rupiah perkapita pertahun. Sedangkan konsumsi otonom (Co) untuk non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 lebih rendah dari konsumsi otonom (Co) pangan yaitu sebesar 240.003 rupiah perkapita pertahun. Sementara konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi maka sebesar 25,8 persen dialokasikan untuk tambahan peningkatan pengeluaran konsumsi pangan. Sedangkan untuk tambahan peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan hanya sebesar 23,8 persen.

Pada bagian kedua tulisan ini **Dewi Harfina S.** dan **Eniarti B. Djohan** menyajikan pula hasil penelitiannya tentang Bentuk dan Pola Kemitraan pada Masyarakat Nelayan Cilacap. Dalam tulisannya ini Dewi dan Eniarti mengemukakan bahwa kehidupan nelayan Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki perahu, masih tergolong dalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Untuk meningkatkan kehidupan nelayan diperlukan usaha dari berbagai pihak, khusus dalam penguatan kapasitas nelayan. Hubungan sinergi berupa kemitraan antara para pemangku kepentingan yang mempunyai tujuan sama dalam kegiatan kenelayanan perlu ditingkatkan. Hubungan kemitraan ini akan terjadi antar pelaku usaha apabila didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan yang sinergis, sehingga tercapai *win-win solution* bagi para pemangku kepentingan yang terlibat hubungan kemitraan. Para pelaku kemitraan juga diharapkan dapat saling menghargai mengembangkan potensi atau kegiatan yang direncanakan agar mendapat keuntungan bersama (*mutual benefits*) yang bertujuan memperkuat kemandirian dan bukan sebagai hubungan ketergantungan. Pada kegiatan kenelayanan, menurut Dewi dan Eniarti, kemitraan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan berbagai pihak untuk membangun kekuatan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan sumberdaya alam di sekitarnya secara optimal agar kehidupan nelayan meningkat. Terbentuknya jaringan sosial antar pemangku kepentingan akan tercipta hubungan kemitraan di antara mereka sehingga terjadi komunikasi yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan kenelayanan. Komunikasi informasi yang diberi melalui kontak antar pemangku kepentingan sebagai mitra

di komunitas nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman baru di antara mereka, misalnya kemitraan yang terjadi antara nelayan atau kelompok nelayan dengan koperasi nelayan, di mana koperasi memasarkan produksi nelayan kepada pihak pengguna atau konsumen dan nelayan sebagai pemasok kebutuhan perusahaan. Dalam tulisannya ini Dewi dan Eniarti berusaha menggambarkan dan mengkaji sistem kemitraan sektor perikanan dalam kegiatan kenelayanan di Kabupaten Cilacap. Tiga hal yang akan dibicarakan, yakni *pertama*, kehidupan masyarakat nelayan Cilacap; *kedua*, kemitraan pada kegiatan kenelayanan di Kabupaten Cilacap; dan *ketiga*, adalah penutup yang menggambarkan dampak implementasi kemitraan pada kegiatan kenelayanan.

Pada tulisan ketiga dalam jurnal ini **Indah Muliati** mengemukakan hasil pemikirannya tentang Pandangan M. Natsir tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam. Menurut Indah, dalam peta pemikiran politik Islam, terdapat perbedaan pandangan terhadap konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Ada kelompok yang menolak dengan tegas terhadap adanya korelasi Islam dengan demokrasi, namun ada pula kelompok yang menerima terhadap adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi dari Barat. Kelompok pertama yang dengan tegas menolak berpendapat bahwa demokrasi tidak memiliki nilai historis dan dukungan sama sekali dalam Islam, sebab sebagai sebuah sistem hukum dan moral, *syari'ah Islam* sudah lengkap. Dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan bukan di tangan rakyat. Sedangkan bagi kelompok yang menerima adanya korelasi Islam dengan konsep demokrasi berpendapat bahwa demokrasi Barat mirip dengan Islam dan memiliki persamaan-persamaan yang signifikan. Beranjak dari dua pemikiran di atas, Indah melihat para pakar politik Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep demokrasi. Salah satu tokoh modernis Indonesia, M. Natsir, memiliki pemahaman tersendiri terhadap konsep demokrasi. Makalah sederhana ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan M. Natsir tentang konsep demokrasi. M. Natsir merupakan salah seorang tokoh politik Islam di Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Islam memiliki konsep tentang cara mengatur Negara meskipun kerangka dasar. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sosial ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut M. Natsir demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintah yang berasal dari barat. Namun M. Natsir sebagai salah seorang tokoh politik Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menolak demokrasi. M. Natsir menawarkan sebuah konsep demokrasi yang sedikit berbeda yang dikenal dengan *Theistik Demokrasi*. *Theistik demo-krasi* dalam pandangan M.Natsir mencoba mempertemukan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Natsir menolak sistem theokrasi dan sekularisasi, namun menerima gagasan nasionalisme. Menurut Natsir demokrasi bertujuan mengarahkan prosedural politiknya ke dalam mekanisme hukum dan kedaulatan rakyat, selain itu menurutnya demokrasi juga bertujuan agar pemerintah dapat melahirkan berlakunya undang-undang Ilahi (Tuhan), baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun manusia sebagai anggota masyarakat. Selain itu demokrasi dalam pandangan M.Natsir harus berjalan di atas prinsip-prinsip: *tauhid*, persaudaraan, persamaan, dan

ijtihad. Jika tidak berjalan di atas prinsip-prinsip tadi, maka tujuan dari demokrasi tidak akan tercapai.

Pada bagian keempat tulisan ini **Mestika Zed**, menyampaikan hasil pemikirannya tentang Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara. Dalam tulisannya ini Mestika Zed mengupas empat hal berkaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspektif budaya dan keserumpunan Melayu Nusantara, yaitu tentang 1) konsep budaya dan keserumpunan Indonesia-Malaysia dalam konteks masa lalu dan masa kini; 2) persamaan budaya dan agama atau keserumpunan yang terbentuk lewat proses sejarah; 3) isu-isu kritis dalam hubungan kedua negara dewasa ini dalam perspektif budaya dan keserumpunan Melayu Nusantara; dan 4) langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan dalam menyikapi isu-isu kritis dalam hubungan kedua negara tersebut. Setelah menguraikan secara detil keempat persoalan tersebut akhirnya Mestika Zed sampai pada suatu kesimpulan bahwa entitas budaya dan keserumpunan antara Malaysia dan Indonesia merupakan determinan yang kekal dalam perjalanan sejarah kedua bangsa selama berabad-abad yang lalu. Namun belakangan ini keduanya menghadapi ujian dan tantangan yang berat. Salah satu penyebab utamanya ialah karena perubahan-perubahan persepsi tentang budaya dan keserumpunan dalam bingkai politik identitas negara-bangsa yang modern. Untuk itu, masing-masing berbicara atas nama kepentingan nasional. Sebagian lain karena tekanan-tekanan globalisasi yang membuat bangsa-bangsa berlomba-lomba bersaing mendapatkan ruang dan tempat untuk mengejar mimpi masyarakat yang dibayangkan (*the imagined community*). Membincangkan masalah hubungan Indonesia-Malaysia hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka merajut kembali hubungan baik antara keduanya demi masa depan anak cucu kita. Tidak ada masa depan tanpa hari ini. Juga hari ini tidak akan ada kalau tidak ada hari kemaren. Sejarah telah menakdirkan kedua bangsa ini menjadi serumpun dan sejarah hari ini pula yang menentukan apakah akar sejarah masa lalu keduanya dibiarkan tercerabut atau harus dipupuk lagi agar tetap tumbuh subur dan segar. Mendingkan persoalan berarti menyediakan jerami kering di musim kemarau. Terlebih lagi karena kebanyakan generasi muda di kedua negara, Malaysia dan Indonesia, dewasa ini makin kurang memahami latar belakang sejarah kedua negara, sejarah bersama dan pengalaman bersama para pendahulu mereka. Sebagian besar perkara budaya dan keserumpunan akhir-akhir ini, lahir dari salah pengertian budaya dan keserumpunan ini, sehingga masalah-masalah sepele sekalipun bisa memicu gejolak dan percikan api yang tak mudah dipadamkan.

Pada bagian kelima tulisan dalam edisi ini **Kevin W. Fogg** mengemukakan pula hasil penelitiannya tentang *Evaluating The PRRI Rebellion As A West Sumatran Peasant Movement*. Melalui tulisan dan penelitiannya ini Kevin mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan persoalan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat sebagai sebuah pergerakan kaum petani, antara lain berkenaan dengan: 1) apakah para petani paham dengan pandangan para pemimpin mereka pada masa pemberontakan?; 2) Apakah mereka masih akan tetap ikut terlibat dalam pemberontakan?; 3) Apakah sikap lekas curiga terhadap keterlibatan militer

aktif merupakan bentuk pengertian yang lebih baik tentang tujuan pemberontakan seperti yang dipahami dan didukung oleh kepemimpinan inti mereka? Dan 4) Apakah petani Minangkabau cenderung menolak borok masa depan dalam narasi tradisi besar. Dengan menggunakan pelbagai sumber penulis coba melacak pemberontakan PRRI dari sudut pandang akar-rumput (petani) sebagaimana tercermin di mata orang yang diwawancarai seperti dikemukakan lewat deskripsi Om Fahmi yang percaya bahwa orang Minang akan tetap melakukan protes melawan imperialisme Jakarta selama keadaan yang ditentang di masa pemberontakan itu masih tetap ada.

Akhirnya pada tulisan terakhir (keenam) dalam edisi ini **Nursyirwan Effendi** mencoba mengemukakan hasil pemikirannya tentang *Pemahaman dan Pembentukan Karakter Masyarakat: Realitas dan Pandangan*. Melalui tulisannya ini Nursyirwan mencoba melihat konsep dan pendekatan ilmiah sosio-antropologi dalam pembentukan karakter dalam masyarakat seperti pendekatan behaviorisme dan interaksionisme serta konstruksi. Dalam tulisan ini juga dipaparkan bagaimana konstruksi karakter manusia dalam kajian antropologi dengan berpatokan pada studi-studi lintas budaya. Selain itu Nursyirwan juga mencoba mendiskusikan model dialektika peran ilmu terhadap pembentukan karakter dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu behaviorisme, interaksionisme dan konstruksi, sehingga memberikan jawaban tentang posisi ilmu dalam tataran normatif dan akademis dalam pembentukan karakter. Pada awal tulisannya Nursyirwan memulai tulisannya dengan mengupas beberapa persoalan menyangkut perilaku korupsi yang ditampilkan oleh pegawai negeri dan para pelaku pendidik di Indonesia sebagai contoh-contoh isu betapa kuatnya cengkeraman korupsi hingga menjangkiti kalangan akademisi atau masyarakat paling terdidik sekalipun. Mereka melakukan korupsi sampai miliaran rupiah dengan berbagai modus, seperti gratifikasi, *mark-up* harga barang dalam tender, memotong uang proyek untuk asuransi, memasukkan dalam rekening deposito, *project fee*, dan lain-lain. Kasus korupsi pada kalangan terdidik dan pendidik, menurut Nursyirwan, merupakan salah satu penanda penting terjadinya fenomena kehancuran karakter sosial. Dalam konteks tulisan ini, perilaku korupsi dapat menjadi pintu masuk memahami penyimpangan karakter berbasis nilai yang luhur. Pada akhir tulisannya Nursyirwan mengemukakan kesimpulannya bahwa lembaga pendidikan yang menjalankan dan mengajarkan keilmuan untuk mempelajari karakter, dalam hal ini adalah para pendidik, memerlukan perhatian khusus untuk menyerap konten ilmu sebagai bagian dari modal ilmiah untuk mengisi proses pembangunan karakter pada diri mereka sendiri. *Commitment* dan identitas peran dari pendidik dalam mempelajari ilmu harus diperjelas, jangan sampai hanya memperlakukan ilmu tersebut sebagai komoditas objektif bagi orang lain, namun perlu juga menjadikannya sebagai komoditas subjektif bagi dirinya sendiri. Secara tematis, pembangunan karakter, terutama karakter bangsa, merupakan isu yang sangat penting untuk terus dikaji dan dirumuskan. Bangsa ini secara dinamis akan mengalami perubahan dalam cara hidup, cara pandang tentang kehidupan dan cara merespon tentang kehidupan. Karena itu, kajian tentang tema ini perlu terus menerus dilakukan, khususnya untuk membantu

pengajar/profesional dan anak didik bersama membangun karakter yang sesuai dengan kehidupan budaya Indonesia.

Tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi Volume XI Nomor 2 Oktober 2015 ini sangat baik dibaca dan dipahami terutama bagi mereka yang ingin mendalami berbagai persoalan yang menyangkut berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, sesuai dengan tema pada edisi ini. Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan selamat menikmati tulisan ini bagi para pembaca semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi para pembaca sekalian.

Selamat membaca...!

Syamsir
Ketua Penyunting